

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kota Surabaya

Vaneza Ayu Dwi Kirana¹, Dwi Khoirotul Utami², Nasywa Aulia Sabrina³, Lailatul Maeda Ramadhani⁴, Mahesa Prawira⁵, Melanika Netta Anggraini⁶, Melda Fadiyah Hidayat⁷, Revienda Anita Fitrie⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Negeri Surabaya.

E-mail: 24040674128@mhs.unesa.ac.id¹, 24040674132@mhs.unesa.ac.id²,
24040674141@mhs.unesa.ac.id³, 24040674152@mhs.unesa.ac.id⁴,
24040674153@mhs.unesa.ac.id⁵, 24040674159@mhs.unesa.ac.id⁶, meldahidayat@unesa.ac.id⁷,
reviendafitrie@unesa.ac.id⁸

Article History:

Received: 11 Mei 2026

Revised: 17 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Keywords: Dana Alokasi Umum, IPM, Desentralisasi Fiskal, Intergovernmental Transfer, Surabaya.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian ini penting mengingat Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi, namun tetap menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data time series periode 2022–2025 serta analisis regresi linear sederhana. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM dengan koefisien regresi sebesar 0,0000041, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi oleh DAU, tetapi juga oleh faktor lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara deskriptif, DAU dan IPM di Surabaya sama-sama mengalami peningkatan selama periode penelitian. Temuan ini mendukung teori desentralisasi fiskal dan intergovernmental transfer, serta menunjukkan bahwa DAU berperan sebagai faktor pelengkap dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan DAU yang efektif perlu disinergikan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berkembang sejak era reformasi tahun 1999 yang ditandai dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kebijakan ini mengubah pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Dalam implementasinya, muncul mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan fiskal. Mekanisme ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Selain itu, kebijakan ini

juga mendorong terciptanya keseimbangan fiskal baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar daerah (Puspita et al., 2021).

Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pembangunan manusia di daerah. Desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal yang lebih spesifik. Hal ini sejalan dengan teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999) yang menekankan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Secara sistematis, transfer fiskal dari pusat akan meningkatkan kapasitas anggaran daerah yang kemudian digunakan untuk memperbaiki layanan publik. Perbaikan layanan tersebut, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi kunci dalam mendorong kualitas pembangunan manusia di tingkat daerah.

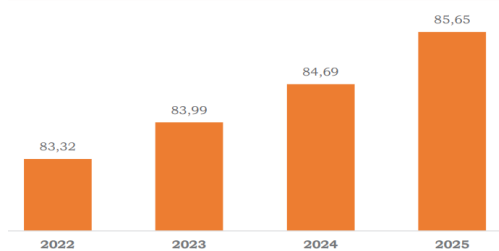
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut, diperlukan suatu indikator yang mampu merepresentasikan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kualitas hidup. IPM tidak hanya menilai aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagaimana diperkenalkan oleh UNDP (1990). Ketiga dimensi tersebut memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pembangunan manusia di suatu daerah. Di Indonesia, data IPM dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) sebagai acuan dalam evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, IPM menjadi indikator penting dalam melihat keberhasilan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, peningkatan IPM tidak terlepas dari peran transfer dana dari pemerintah pusat, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum. Intergovernmental transfer merupakan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal. Fisher (1996) menyatakan bahwa transfer antar pemerintah merupakan fenomena yang umum terjadi dalam sistem keuangan publik di berbagai negara. Salah satu bentuk utama transfer tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DAU bersifat *block grant*, sehingga penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan (Djuuna, 2016; Negara & Khoirunurrofik, 2021). Melalui fleksibilitas tersebut, DAU diharapkan mampu mendukung pembiayaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

Peran DAU menjadi semakin menarik untuk dikaji ketika diterapkan pada daerah dengan karakteristik ekonomi tertentu, seperti Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang berperan sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dengan kapasitas fiskal yang relatif tinggi, Surabaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pembangunan daerah dibandingkan banyak daerah lainnya. Meskipun demikian, Surabaya tetap menerima Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan daerah dengan kapasitas fiskal kuat tetap terintegrasi dalam sistem desentralisasi fiskal nasional. Selain itu, Surabaya juga menjadi bagian dari kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional (ITDP Indonesia, 2024).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di Surabaya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang terus mengalami perkembangan. Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ini mencerminkan

adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Surabaya memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir IPM Surabaya telah mencapai kategori sangat tinggi (BPS Kota Surabaya, 2025). Namun, peningkatan IPM tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Berikut Adalah tran IPM Kota Surabaya tahun 2022-2025.



Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*

<https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/23/364/indeks-pembangunan-manusia-ipm--kota-surabaya-tahun-2025-mencapai-85-65.html>

Meskipun secara teoritis transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, hubungan tersebut tidak selalu berjalan linear dalam praktiknya. Oates (1979) menjelaskan adanya kemungkinan terjadinya ilusi fiskal dalam pengelolaan keuangan publik, sementara Gramlich (1977) memperkenalkan konsep *flypaper effect* yang menunjukkan bahwa dana transfer cenderung lebih mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer serta perbedaan efektivitas pengelolaan anggaran dapat memengaruhi bagaimana dana tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kondisi Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi menimbulkan pertanyaan apakah DAU masih memiliki peran signifikan dalam mendorong peningkatan IPM. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menguji sejauh mana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran dana transfer pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan manusia di tingkat daerah.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari konsep desentralisasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Hidayat (2005), desentralisasi adalah upaya pembagian kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kewenangannya. Dalam praktiknya, desentralisasi

fiskal berpegang pada prinsip *money follows function*, yaitu setiap pelimpahan tugas kepada daerah harus diikuti dengan pelimpahan sumber pembiayaan (Rahmawati, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus disusun secara proporsional agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian dan kapasitas fiskal daerah.

Secara teoritis, desentralisasi fiskal sejalan dengan teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam menyediakan barang publik karena lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal. Terminassian (1997) menjelaskan bahwa penerapan desentralisasi juga merupakan respons global untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif. Siddik (2001) menambahkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan kapasitas keuangan antar daerah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah.

Intergovernmental Transfer

Intergovernmental transfer merupakan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Fisher (1996) menyatakan bahwa transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum dalam sistem keuangan publik di berbagai negara. Nemec dan Wright (1997) menegaskan bahwa transfer fiskal menjadi karakteristik utama dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif teori, Oates (1999) menjelaskan bahwa transfer bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal, menginternalisasi eksternalitas, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dengan adanya transfer ini, daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap dapat menyediakan pelayanan publik secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, intergovernmental transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Djuuna, 2016; Negara & Khoirunurrofik, 2021). DAU bersifat umum, DAK bersifat spesifik, dan DBH berasal dari pembagian penerimaan pajak serta sumber daya alam. Namun, Naganathan dan Sivagnanam (1999) menyatakan bahwa di negara berkembang, transfer sering didasarkan pada kebutuhan pengeluaran daripada kemampuan fiskal daerah. Shah (1994) menambahkan bahwa kondisi ini dapat meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Fenomena ini diperkuat oleh konsep *flypaper effect* yang dikemukakan oleh Gramlich (1977), di mana transfer lebih mendorong belanja daerah dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, efektivitas transfer fiskal sangat bergantung pada tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU bersifat *block grant*, sehingga penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan (UU No. 33 Tahun 2004). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri netto dan dialokasikan kepada provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, DAU menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Proses penghitungan Dana Alokasi Umum dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah tahap akademis, yaitu penyusunan konsep awal formula penghitungan DAU oleh tim independen dari berbagai perguruan tinggi untuk menghasilkan metode perhitungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta karakteristik otonomi daerah di Indonesia. Tahap berikutnya adalah tahap administratif, di mana Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan, mengonsolidasi, dan memverifikasi data dasar yang akan digunakan dalam penghitungan DAU. Setelah itu, pada tahap teknis pemerintah melakukan simulasi penghitungan DAU berdasarkan formula yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan data yang tersedia serta mempertimbangkan rekomendasi akademisi sebelum dikonsultasikan kepada DPR RI.

Tahap terakhir dalam proses penghitungan DAU adalah tahap politis, yaitu pembahasan antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI guna memperoleh persetujuan terhadap hasil penghitungan dan alokasi DAU yang akan ditetapkan. Dalam praktiknya, DAU juga memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, termasuk di Surabaya. Meskipun Surabaya memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, DAU tetap menjadi bagian dari pendapatan transfer pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2025, alokasi DAU untuk Surabaya tercatat sekitar Rp1,42 triliun yang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembiayaan layanan publik, serta pemerataan pembangunan di berbagai sektor di wilayah Jawa Timur.

Dana Alokasi Umum	1.464,32 M	1.464,32 M	100.00
Dana Alokasi Umum	1.290,90 M	1.290,90 M	100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	35,54 M	35,54 M	100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	58,28 M	58,28 M	100.00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	30,60 M	30,60 M	100.00
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	48,99 M	48,99 M	100.00

Berdasarkan gambar diatas menyajikan data anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menunjukkan kinerja penyaluran dana yang sangat optimal. Secara keseluruhan, total Dana Alokasi Umum tercatat sebesar **1.464,32 miliar**, dan seluruh nominal tersebut telah terserap atau terealisasi sepenuhnya dengan tingkat pencapaian **100%**. Jika dirinci berdasarkan peruntukannya, alokasi terbesar ditujukan untuk Dana Alokasi Umum reguler, yakni sebesar **1.290,90 miliar**. Selanjutnya, dana ini juga dibagi menjadi beberapa alokasi spesifik (*earmarked*), yang meliputi bidang pendidikan dengan anggaran sebesar **58,28 miliar**, serta untuk kebutuhan penggajian formasi PPPK sebesar **48,99 miliar**. Sisa dana lainnya dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar **35,54 miliar** dan pendanaan kelurahan sebesar **30,60 miliar**. Sama halnya dengan total keseluruhan, seluruh sub-kategori ini juga telah berhasil disalurkan secara maksimal sesuai dengan target anggaran masing-masing.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam satu periode anggaran. Karlina dan Handayani (2017) menyatakan bahwa belanja daerah tercermin dalam APBD sebagai instrumen utama pembangunan daerah. Melalui belanja daerah, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya

untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Besaran belanja daerah juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia. Suwarni dan Ma'ruf (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pada sektor publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara efektif. Firdayanti dan Hidayat (2020) menambahkan bahwa belanja pada pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktavia dan Handayani (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, belanja daerah menjadi penghubung penting antara kapasitas fiskal dan pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Mahbub ul Haq bersama Amartya Sen melalui United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 sebagai pendekatan alternatif dalam menilai keberhasilan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi, yaitu indeks kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Metode perhitungan ini digunakan secara internasional oleh UNDP dan diadopsi di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik dalam publikasi resmi statistik pembangunan manusia. Oleh karena itu, IPM sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, karena mampu merepresentasikan kualitas hidup penduduk secara lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi semata (UNDP, 1990; BPS, 2023).

Hubungan DAU dan Pembangunan Manusia

Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan kapasitas fiskal daerah. DAU memberikan tambahan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama pada sektor pelayanan publik. Secara konseptual, peningkatan kapasitas fiskal akan mendorong peningkatan belanja daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, DAU berperan sebagai stimulus dalam pembangunan manusia melalui peningkatan belanja publik.

Penelitian empiris mendukung hubungan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Sulastri dan Efendri (2021) yang menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan. Febriyanto (2022) juga menunjukkan bahwa DAU bersama PAD dan DAK berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Barat. Temuan ini menegaskan bahwa transfer fiskal memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan DAU menjadi kunci dalam mendorong peningkatan IPM di daerah.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara objektif dan terukur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini mengolah data numerik yang dianalisis secara statistik guna menguji pengaruh antar variabel, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019) bahwa penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran dan analisis data berbentuk angka. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan time series dengan periode tahun 2022–2025 untuk melihat tren dan perkembangan variabel dari waktu ke waktu. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa Surabaya merupakan kota metropolitan yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, menerima alokasi DAU yang signifikan, serta memiliki nilai IPM yang cenderung meningkat. Pemilihan lokasi ini juga relevan dengan konsep desentralisasi fiskal dan intergovernmental transfer pada Bab II, di mana DAU sebagai transfer fiskal berperan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk mendorong pembangunan manusia. Dengan landasan tersebut, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menentukan jenis data dan sumber data yang digunakan sebagai dasar analisis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk deret waktu yang diperoleh melalui sumber resmi pemerintah. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau publikasi yang telah tersedia, sehingga relevan untuk penelitian berbasis indikator makro seperti DAU dan IPM. Data IPM Kota Surabaya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi, di mana studi literatur digunakan untuk mengkaji teori dan penelitian terdahulu, sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008) mengenai pentingnya penelusuran pustaka dalam penelitian kepustakaan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan resmi seperti “Surabaya dalam Angka” dan laporan realisasi anggaran. Dengan demikian, penggunaan data dan teknik ini bertujuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis. Setelah data diperoleh secara sistematis, tahapan berikutnya adalah menentukan variabel penelitian beserta definisi operasionalnya.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel dependen (Y) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). DAU digunakan sebagai variabel independen karena mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat, yang dalam konteks desentralisasi fiskal merupakan implementasi prinsip *money follows function* sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2005) dan Rahmawati (2008). Selain itu, dalam teori intergovernmental transfer, Fisher (1996) menyatakan bahwa transfer fiskal berfungsi membantu daerah menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan Oates (1999) menegaskan bahwa transfer diperlukan untuk meningkatkan pemerataan fiskal dan efisiensi pelayanan publik. Sementara itu, IPM digunakan sebagai variabel dependen karena merupakan indikator pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sebagaimana diperkenalkan oleh UNDP (1990) dan digunakan oleh BPS sebagai indikator kesejahteraan. Dalam penelitian ini, DAU diukur berdasarkan nilai alokasi dana yang diterima Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun dari DJPK, sedangkan IPM diukur berdasarkan nilai indeks yang dipublikasikan oleh BPS. Dengan demikian, kedua variabel ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan tingkat pembangunan manusia sesuai dengan kerangka teori pada Bab II. Selanjutnya, untuk menguji hubungan antara kedua variabel tersebut, diperlukan teknik analisis data yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen serta mengukur besarnya pengaruh yang ditimbulkan. Model persamaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai:

$$IPM = \alpha + \beta DAU + e$$

Keterangan:

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error term

Pemilihan regresi linear sederhana dinilai tepat karena penelitian ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, sehingga mampu memberikan hasil analisis yang sistematis dan mudah diinterpretasikan.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi ketentuan statistik sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan tidak mengalami penyimpangan. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal akan menghasilkan model regresi yang lebih akurat dalam menjelaskan hubungan antara DAU dan IPM.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians residual dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid.

2. Uji- t (Parsial) (Untuk pengujian hipotesis)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, dimana apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Kota Surabaya.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menjelaskan variasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan DAU dalam menjelaskan perubahan IPM di Kota Surabaya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif time series periode 2022–2025. Secara konseptual, DAU sebagai bagian dari intergovernmental transfer merupakan

instrumen fiskal yang digunakan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah (Fisher, 1996). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan perkembangan masing-masing variabel, tetapi juga menguji hubungan kausal antara keduanya melalui analisis regresi linear sederhana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran transfer fiskal dalam pembangunan manusia di daerah.

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Surabaya Tahun 2022–2025

TaHun	DAU (Miliar Rp)
2022	1.182,44
2023	398.035,25
2024	427.699,30
2025	438.6255,12

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Surabaya menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2005) bahwa transfer fiskal berfungsi untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Berdasarkan data yang disajikan, DAU Surabaya mengalami peningkatan signifikan terutama pada periode 2023–2025, yang menunjukkan adanya perluasan ruang fiskal pemerintah daerah. Kenaikan ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan pembangunan melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Dengan meningkatnya alokasi DAU, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan prinsip *block grant* pada DAU yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan lokal (Rahmawati, 2008). Selanjutnya, untuk melihat kondisi pembangunan manusia di Kota Surabaya, berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022–2025.

Tahun	IPM
2022	83,32
2023	83,99
2024	84,69
2025	85,65

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode penelitian. IPM meningkat dari 83,32 pada tahun 2022 menjadi 85,65 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Menurut UNDP (1990), IPM merupakan indikator komposit yang mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, sehingga peningkatannya mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia secara multidimensional. Peningkatan IPM ini menunjukkan

bahwa kebijakan fiskal daerah, termasuk pemanfaatan DAU, telah diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tren yang stabil ini juga mengindikasikan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam mendukung pembangunan manusia. Dengan demikian, hubungan antara peningkatan DAU dan IPM mulai terlihat secara deskriptif sebagai hubungan yang searah. Teknik analisis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi digunakan sebagai analisis pendukung untuk memastikan validitas model serta menguji signifikansi dan besarnya pengaruh yang dihasilkan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), digunakan analisis regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta DAU + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 83,21 dan koefisien regresi (β) sebesar 0,0000041, sehingga persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$IPM = 83,21 + 0,0000041 DAU$$

Nilai konstanta sebesar 83,21 menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai nol, maka nilai IPM diperkirakan sebesar 83,21. Nilai ini mencerminkan adanya pengaruh faktor lain di luar DAU yang turut memengaruhi pembangunan manusia di Kota Surabaya. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,0000041 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan IPM sebesar 0,0000041 poin. Koefisien ini bernilai positif, yang berarti terdapat hubungan searah antara DAU dan IPM. Dengan kata lain, peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan IPM di Kota Surabaya. Meskipun demikian, besarnya pengaruh DAU terhadap IPM tergolong relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi oleh DAU, tetapi juga oleh faktor lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya. Oleh karena itu, pengelolaan DAU yang efektif dan tepat sasaran sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan, ditemukan model persamaan $IPM = 83,21 + 0,0000041 DAU$. Nilai konstanta sebesar 83,21 memberikan gambaran bahwa tanpa mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) sekalipun, Kota Surabaya secara mendasar telah memiliki basis pembangunan manusia yang sangat kuat. Hal ini merefleksikan posisi Surabaya sebagai kota metropolitan dengan kapasitas fiskal mandiri yang tinggi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,0000041 menunjukkan adanya korelasi positif dan searah, di mana setiap penambahan anggaran DAU berkontribusi pada kenaikan angka IPM. Meskipun dampak nominalnya terlihat kecil secara statistik, tren ini membuktikan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen atau suplemen penting dalam menjaga stabilitas dan akselerasi kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori desentralisasi fiskal yang mengedepankan prinsip *money follows function*. Peningkatan IPM yang konsisten di Surabaya menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan yang disertai dukungan pendanaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeksekusi program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hal ini juga sejalan dengan teori *intergovernmental transfer* yang dikembangkan oleh Wallace E. Oates,

yang menyatakan bahwa transfer pusat berfungsi untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang optimal. Melalui skema block grant, Pemerintah Kota Surabaya memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan DAU untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Secara empiris, hasil ini mendukung penelitian terdahulu oleh Sulastri dan Efendri (2021) serta Febriyanto (2022) yang menegaskan bahwa dana perimbangan memiliki peran strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah pentingnya menjaga efektivitas dan akuntabilitas penyerapan anggaran, terutama mengingat realisasi DAU Surabaya yang telah mencapai target maksimal pada berbagai sub-kategori layanan dasar. Mengingat pengaruh DAU yang positif namun kecil, pemerintah disarankan untuk terus mensinergikan dana transfer pusat dengan PAD secara optimal agar tidak terjadi ketergantungan fiskal yang berlebihan. DAU di sini berperan vital sebagai katalisator dalam mendukung pembiayaan fasilitas publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Dengan demikian, pengelolaan DAU yang tepat sasaran menjadi kunci bagi Surabaya untuk mempertahankan status pembangunan manusia kategori "sangat tinggi" dan memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya, di mana peningkatan dana yang diterima pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis regresi linear sederhana, hubungan antara DAU dan IPM dapat dijelaskan secara jelas baik dari arah maupun besarnya pengaruh, sehingga menunjukkan bahwa DAU merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan IPM, meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Alokasi Umum yang dilakukan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran sangat diperlukan agar mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perlu diimbangi dengan perhatian terhadap faktor lain di luar DAU yang juga berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan DAU di Kota Surabaya selama periode 2022–2025 cenderung mengalami peningkatan, yang mencerminkan adanya dukungan fiskal dari pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi fiskal. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berada pada kategori sangat tinggi, sehingga mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di daerah tersebut. Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara DAU dan IPM bersifat positif, yang berarti peningkatan DAU diikuti dengan peningkatan IPM. Namun demikian, besarnya pengaruh DAU terhadap IPM tergolong relatif kecil, sehingga menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Surabaya tidak hanya ditentukan oleh transfer fiskal, tetapi juga oleh faktor lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999) bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta teori intergovernmental transfer oleh Fisher (1996) yang menekankan pentingnya transfer fiskal dalam mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antar daerah. Dengan demikian, DAU dapat dipandang sebagai instrumen pendukung dalam

pembangunan manusia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DAU memiliki pengaruh positif terhadap IPM, perannya lebih bersifat sebagai pelengkap dalam sistem pembiayaan pembangunan daerah, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif tinggi seperti Kota Surabaya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pengalokasian anggaran sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sinergi antara DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat

Bagi pemerintah pusat, kebijakan transfer fiskal khususnya Dana Alokasi Umum perlu terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah secara optimal. Penentuan alokasi DAU sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan fiskal, tetapi juga kinerja pembangunan daerah, termasuk capaian Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, kebijakan transfer fiskal dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang juga memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja daerah, serta faktor sosial ekonomi lainnya. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti regresi berganda atau pendekatan panel data juga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). *KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO , KECIL DAN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS BASED ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTITY ACCOUNTING STANDARDS (SAK EMKM)*. 19(1), 25–30
- Andrian, Y., & Samekto, A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa*. 10(2), 139–152.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022*. BPS Kabupaten Toraja Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2022-2025*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Courant, P. N., Gramlich, E. M., & Rubinfeld, D. L. (1979). *Public employee market power and the level of government spending*. National Tax Journal, 32(4), 457–468.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Data Realisasi Dana Alokasi Umum Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Djuuna, A. (2016). *Transfer fiskal dalam sistem desentralisasi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), 45–58.
- Febriyanto, R. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(2)
- Firdayanti, F., Hidayat, M. T. (2017). *PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERIODE 2011-2017)*. 4(1), 49-66.
- Fisher, R. C. (1996). *State and Local Public Finance*. Chicago: Irwin Professional Publishing.
- Gramlich, E. M. (1977). *Intergovernmental grants: A review of the empirical literature*. In W.E. Oates (Ed.), *The Political Economy of Fiscal Federalism*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Indira, R., Juniarta, D., & Ulandari, W. (2025). *Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur*. 2(3), 261–274.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2012-2015*. 6 (3).
- Munir, M., & Mahdar, N. M. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 3(2), 30–37
- Naganathan, M., & Sivagnanam, K. J. (1999). *Federal transfers and regional development in India*. Asian Economic Review, 41(2), 201–215.
- Negara, S. D., & Khoirunurrofik. (2021). *Fiscal decentralization and regional inequality in Indonesia*. Journal of Southeast Asian Economies, 38(2), 240–260.
- Nemec, J., & Wright, G. (1997). *Public finance: Theory and practice in central European transition*. Public Administration Review, 57(4), 353–361.
- Niskanen, W. A. (1968). *The peculiar economics of bureaucracy*. American Economic Review, 58(2), 293–305.
- Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149.
- Prasetyo, K., & Sriyani. (2025). *Regional financial accountability as moderator of intergovernmental transfers' impact on economic growth and income inequality*. Journal of Regional Finance and Development.
- Rahma, T., & Suparta, I. M. (2025). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SURABAYA*. 05(04), 904–916.
- Rahmadillah, R., & Nufaisa. (2024). *Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi STIEP (JES) Pendahuluan. 9(1).
- Rahmawati, I. N., & Suryono, B. (2015). *FLYPAPER EFFECT DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI*. 4(9).
- Shah, A. (1994). *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies*. Washington DC: World Bank
- Sulastri, S., & Efendri, E. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota-Kota Besar Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1).
- Suwarni, D. E., Farid, M., Sos, S., & Ap, M. (2016). *ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SURABAYA (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan) Abstrak*. 1–7.
-

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1990). *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. New York: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.